

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia memiliki permasalahan kemiskinan hingga yang menyebar di seluruh daerah. Permasalahan yang secara kompleks dapat menghambat kesejahteraan masyarakat dan dapat menimbulkan dampak negative yang mempengaruhi pembangunan ekonomi negara. kemiskinan tidak bersifat secara permanen meskipun dapat berlangsung dalam waktu yang tidak dapat ditentukan dan kemiskinan tidak dapat dikatakan sebagai karekteristik seseorang atau masyarakat secara terus menerus.

Menurut Badan Pusat Statistik jumlah penduduk miskin pada bulan Maret mencapai 27,54 juta orang, kemudian bulan September 2021 jumlah penduduk miskin mengalami penurunan 1,04 juta orang atau menjadi 26,50 juta orang miskin dengan Persentase sebesar 9,71 persen atau menurun sebesar 0,43 persen dari bulan Maret 2021. Kawasan pedesaan dengan Jumlah penduduk miskin pada bulan Maret 2021 mencapai 15,37 juta orang dengan persentase 13,10 persen dan bulan September 2021 mengalami penurunan sebesar 0,73 juta atau menjadi 14,46 juta orang miskin dengan persentase sebesar 12,53 persen.

Fenomena kemiskinan menjadi permasalahan yang selamanya akan ada di penjuru dunia. fenomena tersebut ditanggapi oleh pemimpin dunia dengan adanya kesepakatan deklarasi *Millenium Development Goals (MDGs)* yang memiliki target mengurangi kemiskinan hingga 50% sampai tahun 2015. Namun pada tahun 2015 MDGs masih belum dapat mengatasi persoalan kemiskinan dan tentunya membutuhkan waktu yang lebih lama dalam mengatasi persoalan tersebut. sehingga pada tahun 2015 MDGs diganti dengan SDGs yang memiliki 17 tujuan

salah satunya dalam tujuan pertama yaitu pengentasan kemiskinan dengan jangka waktu 15 tahun ke depan tahun 2015-2030.

Pemerintah Indonesia sejak tahun 2007 telah melakukan beberapa upaya dalam percepatan pengentasan kemiskinan yaitu dengan pelaksanaan Program Keluarga Harapan. Secara internasional Program Keluarga harapan dikenal dengan istilah *Conditional Cash Transfers (CCT)*, negara-negara yang menganut program perlindungan sosial ini terbukti mampu mengatasi permasalahan kemiskinan yang ada. Pemerintah telah mengesahkan kebijakan dalam pengentasan kemiskinan yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) melalui UU No. 40 Tahun 2004 tentang jaminan social kemudian dilanjutkan adanya Perpers Nomor 15 Tahun 2010 Tentang percepatan penanggulangan kemiskinan dan disempurnakan dengan peraturan menteri social republic Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) yang ditetapkan dengan tujuan membantu pelaksanaan penyebaran program perlindungan social yang berkesinambungan, terarah dan terencana

Pemerintah menentukan karekteristik kemiskinan yang digunakan untuk persyaratan menjadi keluarga penerima manfaat. Karekteristik atau syarat tersebut telah membuka akses keluarga miskin dalam memanfaatkan sarana pendidikan dan sarana kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam mensejahterahkan kehidupannya. Menurut Nugraha (2020), menyatakan bahwa Manfaat program keluarga harapan yaitu bersifat jangka pendek sekaligus jangka panjang. Manfaat jangka pendek yaitu mengurangi beban perekonomian keluarga atau income effect, manfaat jangka panjang dalam program ini yaitu pendidikan dan kualitas kesehatan yang berharap rantai kemiskinan antar generasi dapat diputuskan.

Bantuan sosial tersebut merupakan salah satu program jangka panjang dan keluarga penerima tidak secara permanen. Menurut Nugraha (2020), menyatakan bahwa Keluarga penerima manfaat mendapatkan bantuan dengan jangka enam tahun apabila keluarga tersebut masih tergolong dalam syarat-syarat ketentuan yang berlaku, sedangkan keluarga penerima manfaat tidak memenuhi syarat yang melekat maka penerima diharuskan untuk keluar secara alamiah (natural exit).

Salah satu Provinsi di Indonesia yang mengalami kemiskinan yaitu Provinsi Jawa Timur. Menurut Badan Pusat Statistik Jawa Timur jumlah penduduk di Jawa Timur pada tahun 2021 sebesar 40.994.615 jiwa dengan jumlah angka kemiskinan pada bulan September 2021 sebesar 4,259 juta jiwa atau menurun sebesar 0,313 juta jiwa. Persentase kemiskinan di perdesaan pada bulan Maret 2021 sebesar 15,05 persen turun sebesar 13,79 persen pada bulan September 2021 dengan periode yang sama jumlah penduduk miskin di perdesaan turun sebesar 241,8 ribu jiwa yang awalnya 2,732 juta jiwa pada bulan Maret 2021 menjadi 2,490 juta jiwa pada September 2021). Sedangkan persentase penduduk miskin di perkotaan pada bulan Maret 2021 mencapai 8,38 persen mengalami penurunan mencapai 7,99 persen pada September 2021 dengan periode yang sama jumlah penduduk miskin di perkotaan pada bulan September 2021 turun sebesar 71,3 ribu jiwa yang awalnya 1,840 juta jiwa pada bulan Maret 2021 menjadi 1,768 juta jiwa pada bulan September 2021 . Berikut tabel persentase penduduk miskin menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2021 menunjukkan bahwa Kabupaten Lamongan menduduki peringkat ke sembilan yang memiliki penduduk miskin di Jawa Timur.

**Tabel 1.1. Persentase Penduduk Miskin Menurut
Kabupaten/Kota di Jawa Timur**

No.	Kabupaten/Kota	Persentase Penduduk Miskin(%)
1.	Pacitan	15.11%
2.	Ponorogo	10.26%
3.	Trenggalek	12.14%
4.	Tulungagung	7.51%
5.	Blitar	9.65%
6.	Kediri	11.64%
7.	Malang	10.5%
8.	Lumajang	10.05%
9.	Jember	10.41%
10.	Banyuwangi	8.07%
11.	Bondowoso	14.73%
12.	Situbondo	12.63%
13.	Probolinggo	18.91%
14.	Pasuruan	9.7%
15.	Sidoarjo	5.93%
16.	Mojokerto	10.62%
17.	Jombang	10%
18.	Nganjuk	11.85%
19.	Madiun	11.91%
20.	Magetan	10.66%
21.	Ngawi	15.57%
22.	Bojonegoro	13.27%
23.	Tuban	16.31%
24.	Lamongan	13.86%
25.	Gresik	12.42%
26.	Bangkalan	21.57%
27.	Sampang	23.76%
28.	Pamekasan	15.3%
29.	Sumenep	20.51%
	Kota	
30.	Kediri	7.75%
31.	Blitar	7.89%
32.	Malang	4.62%
33.	Probolinggo	7.44%
34.	Pasuruan	6.88%
35.	Mojokerto	6.39%
36.	Madiun	5.09%
37.	Surabaya	5.23%
38.	Batu	4.09%

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur, 2021

Berikut tabel penduduk miskin di Kabupaten Lamongan tahun 2017-2021.

**Tabel 1.2. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin
Di Kabupaten Lamongan Tahun 2017-2021**

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin
2017	171.38	14.42%
2018	164.00	13.80%
2019	157.11	13.21%
2020	164.68	13.85%
2021	166.82	13.86%

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur, 2021

Dari data diatas menunjukkan bahwa penduduk miskin di Kabupaten Lamongan tahun 2017-2021 angka kemiskinan dan persentase kemiskinan mengalami penurunan, namun pada tahun 2020-2021 angka kemiskinan dan persentase kemiskinan mengalami kenaikan kembali dan tahun 2021 angka kemiskinan sebesar 166.82 dan persentase kemiskinan sebesar 13.86 persen hal ini menunjukkan bahwa kemiskinan di kabupaten Lamongan mengalami fluktuatif. Salah satu faktor Penurunan jumlah kemiskinan di Kabupaten Lamongan yaitu tidak lepas dari adanya program pemerintah terhadap pengentasan kemiskinan.

Desa Duriwetan adalah salah satu desa yang terletak di Kabupaten Lamongan. Desa Duriwetan terdapat 13 RT 2 RW dengan jumlah penduduk mencapai 1869 jiwa dengan jumlah rumah tangga sebanyak 570 KK. Kondisi penduduk di desa duriwetan rata-rata memiliki penghasilan dari petani padi dan berdagang, dari penghasilan tersebut dapat menghidupi kebutuhan sehari-hari dan biaya untuk pendidikan anaknya. Namun tidak semua orang mampu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan memberikan pendidikan yang cukup untuk anaknya, dari kondisi ini tentunya seseorang atau keluarga tersebut membutuhkan bantuan yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Berikut bantuan sosial dan jumlah penerima bantuan di Desa Duriwetan.

Tabel 1.3.
Jenis Bantuan Sosial dan Jumlah Penerima Bantuan
di Desa Duriwetan Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan
Tahun 2021

No.	Jenis Bantuan Sosial	Jumlah Penerima Bantuan	Persentase Penerima Bantuan
1.	Bantuan Pangan Non Tunai	127	22.28%
2.	Bantuan Langsung tunai	101	17.72%
3.	Bantuan Langsung Tunai Dana Desa	97	17.02%
4.	Program Keluarga Harapan	90	15.79%
5.	Bantuan Sosial Tunai	88	15.44%

Sumber: Pemerintahan Desa Duriwetan, 2021

Menurut data diatas menunjukkan bahwa Program Keluarga Harapan dengan jumlah penerima bantuan sebesar 90 keluarga. Bantuan pangan non tunai jumlah penerima bantuan sebesar 127 KPM, bantuan langsung tunai dengan jumlah penerima sebesar 101 KPM, bantuan langsung tunai dana desa dengan jumlah penerima sebesar 97 KPM, dan bantuan sosial tunai dengan jumlah penerima sebesar 88 KPM. Keluarga penerima manfaat PKH dengan jumlah 90 keluarga tersebut menyebar di 13 RT dan 2 RW. Berikut data keluarga penerima manfaat per RT.

Keluarga penerima manfaat dengan total 90 keluarga tersebut setiap keluarga mendapatkan jenis komponen yang berbeda mulai dari pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan. Komponen pendidikan di mulai dari SD hingga SMA, komponen kesehatan diberikan kepada anak usia dini dan ibu hamil sedangkan komponen kesejahteraan diberikan kepada lanjut usia dan disabilitas berat. Upaya dalam meningkatkan SDM melalui pendidikan dan kesehatan, peningkatan tersebut dianggap sebagai hubungan timbal antara pemerintah yang

memberikan program dengan keluarga yang mendapatkannya (Sulaeman, 2017). Pendidikan tinggi dapat meningkatkan sumber daya manusia dan memiliki kesempatan untuk memperoleh pekerjaan yang layak. sehingga meningkatnya sumber daya manusia dapat mempengaruhi pemerataan pendapatan masyarakat. Pendapatan tersebut dapat digunakan untuk membuka lapangan pekerjaan dan lainnya yang dapat meningkatkan pendapatan (Luthfi, 2019).

Tabel 1.4.
Jumlah Keluarga Penerima Manfaat di
Desa Duriwetan

RT/RW	Jumlah KPM PKH
1/1	15 KPM
2/1	10 KPM
3/1	6 KPM
4/1	5 KPM
5/1	4 KPM
6/1	8 KPM
7/1	6 KPM
1/2	2 KPM
2/2	11 KPM
3/2	2 KPM
4/2	10 KPM
5/2	7 KPM
6/2	4 KPM

Sumber : Pemerintahan Desa Duriwetan,2021

Menurut tabel 4.1 diatas menunjukan bahwa KPM PKH menyebar di berbagai RT dan RW. Keluarga dengan memperoleh bantuan program keluarga harapan (PKH) terbanyak yaitu RT 01 RW 01, tingkat pendidikan KPM PKH di RT ini rata-rata berpendidikan sekolah dasar (SD) dan dari segi infrakstruktur RT ini memiliki jarak cukup jauh dari pusat Desa seperti balai desa, pasar, sekolah dan fasilitas kesehatan. keluarga yang mendapatkan PKH sebanyak 2 KPM yaitu di RT 01/ RW 02 dan RT03/ RW 02, seperti di RT 03/ RW 01 terdapat 2 KPM PKH salah satu penyebabnya yaitu di RT ini penduduknya rata-rata tidak berada dirumah.

Permasalahan dalam penelitian ini yaitu tidak tepat sasaran penerima program keluarga harapan. Keluarga yang mendapatkan bantuan tersebut belum tentu semuanya keluarga yang membutuhkan. Ketepatan sasaran dilihat dari karakteristik kemiskinan yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Salah satu karakteristik kemiskinan seperti pendapatan, jika diteliti dari segi pendapatan antara keluarga penerima manfaat dengan keluarga yang tidak menerima manfaat Program Keluarga Harapan mereka memiliki perbedaan meskipun perbedaannya tidak terlalu besar.

Menurut penelitian (Muliana,2020) mengatakan bahwa program keluarga harapan memudahkan keluarga untuk mengakses fasilitas pendidikan, kesehatan dan peningkatan pendapatan peserta PKH. Sehingga bantuan tersebut memiliki pengaruh terhadap pengentasan kemiskinan. Keluarga yang mendapatkan bantuan ini sangat bermanfaat dalam akses fasilitas kesehatan khususnya bersalin. Namun dalam evaluasi program keluarga harapan (PKH) dilihat dari faktor yang mendukung seperti alat komunikasi dan informasi, bantuan sosial JKN-PBI dan sarana transformasi (Putra,2019).

Menurut Haqiqi (2021), mengatakan bahwa kesejahteraan keluarga penerima manfaat dipengaruhi oleh pendapatan yang signifikan dan konsumsi rumah tangga yang signifikan dan positif. Keluarga penerima manfaat merasakan dampak perekonomian yang mulai membaik dan mengurangi angka putus sekolah khusus anak usia 6-12 tahun. Sedangkan dari segi fasilitas kesehatan diharapkan dapat meningkatkan jaminan kesehatan dalam pelayanan atau bentuk makanan yang di konsumsi pada keluarga miskin (Ghofur, 2019). Program keluarga harapan (PKH) dalam penanggulangan kemiskinan mempermudah akses layanan kesehatan, pendidikan dan peningkatan pendapatan keluarga penerima manfaat

(KPM) dampak tersebut dapat dirasakan secara nyata oleh penerima manfaat (Arapah, 2020).

Sehingga dari fenomena yang berada di desa duriwetan dan menurut penelitian terdahulu, penulis ingin melakukan penelitian tentang “Dampak Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap pengentasan Kemiskinan di Desa Duriwetan Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan”.

1.2. Rumusan Masalah

Bagaimana dampak program keluarga harapan (PKH) terhadap Pengentasan kemiskinan di Desa Duriwetan Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yaitu untuk menganalisis dan menganalisis dampak program keluarga harapan terhadap pengentasan kemiskinan Di Desa Duriwetan Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis yaitu penelitian ini berharap mampu dalam mengembangkan teori pengentasan kemiskinan terkait dengan dampak program keluarga harapan terhadap pengentasan kemiskinan di Desa Duriwetan Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan
2. Manfaat praktis yaitu penelitian ini berharap menjadi referensi bagi pemerintah Desa Duriwetan dan pemerintah yang terkait dalam membuat kebijakan-kebijakan dalam pengentasan kemiskinan.